

40. PENGUATAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DALAM RANGKA MENGHADAPI PASAR TERBUKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

by Didik Iswahyudi

Submission date: 25-Sep-2020 02:50PM (UTC+0700)

Submission ID: 1396624428

File name: 40._PENGUATAN_PENDIDIKAN_SEKOLAH_DASAR.pdf (569.95K)

Word count: 5650

Character count: 37075

ISSN 2502-8723

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

Pendidikan dan Pembelajaran
bagi Guru dan Dosen 2016



FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

BRILLIANT BRIGHT FUTURE



UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

Multicultural University
unikama
Universitas Kanjuruhan Malang



9 772502 872010

**PENGUATAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR
DALAM RANGKA MENGHADAPI PASAR TERBUKA
MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

Supriyanto dan Didik Iswahyudi

Dosen Program Studi Pendidikan IPS
Program Pascasarjana Universitas Kanjuruhan Malang
Jl. S. Supriyadi No 48 Sukun Malang Indonesia

e-mail: maspriyanto79@gmail.com

Abstrak

Pendidikan dasar menjadi peletak dasar pendidikan pada jenjang di atasnya. Jika pendidikan diibaratkan sebuah bangunan, maka pendidikan sekolah dasar adalah pondasi bagi bangunan pendidikan yang sangat menentukan kokohnya bangunan di atasnya. Namun demikian usaha ke arah penguatan pendidikan dasar masih perlu terus ditingkatkan. Hal mendasar yang perlu mendapat perhatian adalah kualitas pendidikan dasar dalam rangka menyiapkan lulusan pendidikan pada tahap berikutnya. Dalam konteks inilah artikel ini ditulis untuk menggugah kesadaran bersama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar yang diharapkan oleh Undang-Undang Pendidikan Nasional dan cita-cita bersama Bangsa Indonesia.

Kata kunci: penguatan, sekolah dasar, ekonomi ASEAN

Pendahuluan

Indonesia telah diakui oleh dunia Internasional sebagai negara yang pertumbuhan ekonominya sehat. Data beberapa sumber menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir ini Indonesia termasuk 9 negara yang ekonominya sehat. Laporan di tahun 2015 juga menyebutkan bahwa Indonesia termasuk negara tiga besar yang pertumbuhan ekonominya paling baik di kelompok G20. Indonesia hanya dibawah China dan India (Pujiastuti, 2015)

Namun demikian kemajuan di bidang pertumbuhan ekonomi ini tidak

seiring dengan kemajuan pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Indonesia masih perlu terus berbenah diri. Data tahun 2015 yang dikutip oleh BBC Indonesia menyebutkan bahwa pendidikan dasar Indonesia berada pada peringkat yang ke 69 dari 76 negara yang disurvei (Coughlan, 2015). Data ini juga menyebutkan bahwa Singapura berada di peringkat pertama, diikuti oleh Hong Kong. Sedangkan peringkat terendah adalah Ghana yang menduduki posisi terbawah. Sementara Indonesia menduduki posisi nomor 69 dari 76 negara. Data tersebut juga menyebutkan Inggris menempati peringkat

ke-20, sedangkan beberapa negara Eropa lainnya berprestasi lebih baik. Amerika Serikat bertengger di posisi ke-28 (Coughlan, 2015). Organisasi kerjasama dan pembangunan Eropa OECD juga mengatakan perbandingan itu diambil berdasarkan hasil tes di 76 negara serta menunjukkan hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Data ini tidak merubah posisi keseluruhan Indonesia dalam bidang pendidikan karena tahun 2011 Indonesia juga berada pada posisi ke 69 dunia, hal ini menunjukan bahwa pendidikan dasar kita memang perlu dibenahi.

Pestasi yang tidak menggembirakan dalam bidang pendidikan ini perlu mendapat perhatian yang serius. Utamanya dalam menghadapi persaingan ekonomi di ASEAN. Sebagai bagian dari masyarakat regional maupun global, bangsa Indonesia perlu untuk ikut serta dalam upaya membangun peradaban manusia yang lebih baik. Isu yang paling dominan dalam konteks masyarakat global maupun regional adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Khusus dalam konteks regional, Indonesia berada pada posisi yang perlu mempersiapkan diri secara lebih serius untuk bersaing menghadapi berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama pembangunan. Untuk memenuhi sumberdaya manusia tersebut,

pendidikan memiliki peran yang sangat penting (Supriyanto, 2016).

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di setiap jenjang , harus diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan tersebut. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan masyarakat. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional ini sejalan dengan kebutuhan kita untuk bersaing di tingkat regional ASEAN.

Kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian Goleman (1996) mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 persen oleh *hard skill* dan sisanya 80 persen oleh *soft skill*. Bahkan orang-orang tersukses di dunia bisa berhasil dikarenakan lebih banyak didukung kemampuan *soft skill* daripada *hard skill*. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan peserta didik sangat penting untuk ditingkatkan, terlebih lagi untuk bersaing di tingkat regional masyarakat ekonomi ASEAN. Penelitian ini juga menunjukan kepada kita, bahwa untuk mempersiapkan peserta didik bersaing dibidang ekonomi

mebutuhkan pendidikan, terutama pendidikan dasar.

PERMASALAHAN PENDIDIKAN DASAR

Proses pendidikan di sekolah dasar menempati posisi yang sangat vital dan strategis. Kekeliruan dan ketidaktepatan dalam melaksanakan pendidikan di tingkat dasar ini akan berakibat fatal untuk pendidikan tingkat selanjutnya. Sebaliknya, keberhasilan pendidikan pada tingkat ini akan membuahkan keberhasilan pendidikan tingkat lanjutan. Namun demikian kenyataannya tidaklah demikian, berbagai pihak justru menempatkan pendidikan dasar berada pada posisi lebih rendah daripada tingkat pendidikan yang lain, terbukti antara lain, dengan adanya perlakuan pada sekolah dasar yang berbeda dengan sekolah lanjutan. Diantara perlakuan tidak seimbang itu antara lain, kurangnya sarana pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, sarana pengembangan bakat seperti sarana olahraga, kesenian dibanding dengan sekolah pada jenjang diatasnya.

Usaha-usaha meningkatkan kualitas sekolah dasar sudah sangat mendesak. Tanpa ada peningkatan kualitas sekolah dasar yang mendasar, usaha-usaha peningkatan kualitas sekolah lanjutan menengah pertama dan menengah atas tidak akan berhasil dengan maksimal. Di samping

itu kondisi-kondisi yang ada menunjukkan bahwa secara kuantitas penyediaan fasilitas sekolah dasar sudah memadai. Pada tahun 1986, sudah lebih dari 94% anak umur sekolah dasar (umur 7 – 12) telah tertampung di usaha-usaha (Zamroni,2012). Malahan sebagai hasil dari program pengendalian penduduk, penambahan murid sekolah dasar kelas satu sudah mulai menurun. Untuk tahun-tahun mendatang ini, gejala-gejala menurunnya murid kelas satu akan semakin nampak jelas terasa. Oleh karena itu, problema sekolah dasar akan bergeser dari bagaimana menyediakan fasilitas bergerak kepada bagaimana mengorganisir sekolah dasar yang semakin kecil tetapi bisa semakin berkualitas. Bagi sekolah negeri barangkali problema ini tidak begitu terasa, tetapi bagi swasta yang terjadi adalah sebaliknya.

1. Pentingnya Kualitas Sekolah Dasar

Sekolah dasar yang bermutu menjadi keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri pentingnya. Beeby (1983 dalam Zamroni, 2012) menyatakan dalam hubungan dengan usaha peningkatan kualitas sekolah dasar, ada dua bentuk usaha peningkatan kualitas sekolah. Bentuk pertama adalah peningkatan kualitas sistem dan manajemen sekolah. Hal ini berhubungan dengan "*the flow of students*". Usaha kedua adalah peningkatan kualitas proses pembelajaran di ruang-ruang kelas.

Usaha peningkatan kualitas yang berhubungan "*the flow of students*" pada dasarnya bertujuan untuk menghilangkan pemborosan sebagai akibat internal *inefficiency in education*. Kebijakan apa yang dapat dikembangkan sehingga tingkat anak didik mengulang kelas dan putus sekolah bisa ditekan, bahkan kalau mungkin dihilangkan. Wajib Belajar Pendidikan Dasar, untuk anak umur 7-15 tahun dan pembebasan uang SPP merupakan kebijakan yang penting dan tepat untuk mengurangi tingkat putus sekolah ini. Meskipun usaha ini telah dilakukan di berbagai daerah, namun kenyataannya masih ada saja sekolah dasar yang memberikan beban keuangan yang tidak ringan kepada wali murid.

Untuk menghilangkan "*repeaters*" nampaknya lebih sulit. Apalagi informasi berkenaan dengan sebab-sebab ulang kelas ini sangat sedikit. Salah satu usaha untuk menghilangkan ulang kelas adalah dengan menetapkan "*automatic class promotion system*". Dengan sistem ini anak didik setiap tahun secara otomatis akan naik kelas. Sehingga nanti umur anak didik akan menunjukkan kelasnya. Sudah barang tentu kebijakan ini harus diiringi dengan kebijakan "*remedial programs*". Anak didik yang tidak bisa mengikuti pelajaran atau tertinggal harus mengikuti pelajaran tambahan. Kebijakan ini untuk negara kita tidaklah mustahil, mengingat jumlah murid sekolah dasar semakin kecil sebaliknya jumlah guru berlebihan. Dengan semakin kecilnya rasio murid guru, maka guru akan bisa mengenai dengan tepat perkembangan anak didik.

Dalam peningkatan mutu SD, masalah kurikulum, kualitas guru dan lingkungan

keluarga perlu mendapat perhatian. Pada level nasional, pengembangan kurikulum merupakan proses politik, administrasi dan birokrasi, serta sekaligus proses profesionalisme. Proses ini mengandung negosiasi antara harapan-harapan dan sumber-sumber yang tersedia. Apabila dalam proses pengembangan kurikulum ini masalah-masalah yang riil ada di kelas diperhitungkan maka kurikulum akan memberikan sumbangan yang besar pada peningkatan kualitas sekolah. Dua hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah kebutuhan lingkungan dan kemampuan guru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu yang lalu melontarkan ide perlunya warna lokal pada kurikulum pendidikan kita. Ide tersebut sangatlah tepat dan perlu untuk mendapatkan support dan partisipasi dari para pendidik. Kebhinekaan masyarakat kita yang tercermin dalam banyak aspek kehidupan: lingkungan fisik, sosial dan budaya, perlu untuk diperhitungkan dalam pengembangan kurikulum. Realitas kebhinekaan ini, merupakan dasar yang logis untuk mengembangkan kurikulum nasional yang berwarna lokal. Kurikulum yang "murni bersifat nasional" sulit untuk bisa diterima. Kurikulum yang demikian itu akan menghasilkan keterasingan pada sementara anak didik, sebab apa yang dipelajari di

sekolah tidak relevan dengan lingkungan sekelilingnya.

Proses pengembangan kurikulum berwarna lokal dalam kurikulum nasional hendaknya lebih banyak menarik partisipasi para pendidik. Kalau di tingkat nasional pengembangan kurikulum lebih banyak dilakukan oleh para "perencana dan administrator pendidikan", maka pengembangan kurikulum lokal seyogyanya lebih banyak ditentukan oleh pendidik sendiri.

Selain isi kurikulum (*intended curriculum*) maka sistem pengajaran (*the instructional delivery system*) perlu untuk mendapat perhatian. Pendidikan pada tingkat sekolah dasar diarahkan untuk mengembangkan kreatifitas, kecintaan dan loyalitas pada tanah air, dan *critical thinking* pada diri anak didik. Untuk mencapai tujuan ini maka model *Student Active Learning* adalah merupakan metoda yang paling tepat. Kemampuan para guru sekolah dasar perlu untuk ditingkatkan. Usaha-usaha peningkatan kualitas guru sekolah dasar ini harus didasarkan pada kemampuan guru yang ada sekarang ini untuk diarahkan pada kemampuan yang diinginkan. Untuk ini perlu ada kegiatan "*need of assessment*" sehingga berdasarkan kegiatan itu bisa disusun "peta kualitas guru". Hal ini menghindarkan adanya "*in service training*" yang tidak tepat. Langkah yang lebih mendasar, adalah meningkatkan kualitas guru secara formal.

Usaha-usaha pengembangan kreatifitas anak didik dan kecintaannya pada tanah air dapat dilaksanakan pula lewat proses interaksi yang terjadi di sekolah. Sebagaimana yang telah disinggung di depan, sekolah adalah *merupakan "a mini society"*. Guru harus bisa memanipulasi aktifitas dan interaksi anak didik untuk mengembangkan kreatifitas anak dan kecintaan pada tanah air. Misalnya, bagaimana guru bisa memberikan kesempatan pada anak didik untuk menentukan kegiatan olah raga yang akan dilaksanakan, apa yang harus dilakukan pada anak yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah, membuat peraturan-peraturan di kelas ataupun di luar kelas.

Hasil pendidikan di sekolah dasar dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Penelitian-penelitian yang dilakukan baik di negara Barat maupun di negara kita membuktikan statement di atas. Ada lima aspek dari lingkungan keluarga yang berpengaruh terhadap hasil pendidikan sekolah dasar. Pertama, pola perilaku anak dan orang tua; kedua, bantuan dan petunjuk orang tua dalam belajar; ketiga, diskusi antara orang tua dan anak; dan, keempat, penggunaan bahasa di rumah, dan aspirasi pendidikan orang tua.

Anak dari kalangan keluarga di mana ada struktur kegiatan memiliki prestasi yang lebih baik daripada anak yang datang dari kalangan keluarga yang tidak mempunyai

struktur kegiatan. Memiliki struktur kegiatan berarti dalam keluarga tersebut ada jadwal kegiatan dan tanggung jawab anak secara jelas. Kapan waktu belajar, waktu bermain, waktu membantu orang tua melakukan pekerjaan rumah tangga. Waktu-waktu tersebut harus ditepati. Pelanggaran yang dilakukan akan dapat mengakibatkan tidak dapat melihat TV, misalnya.

Bantuan dan petunjuk orang tua bagi anak dalam kegiatan-kegiatan belajar sangat diperlukan. Anak yang datang dari keluarga di mana orang tuanya membantu dan memberikan petunjuk belajar mempunyai prestasi yang lebih baik daripada anak yang datang dari keluarga yang tidak mau tahu tentang kegiatan belajar anaknya. Sekolah bagi anak bukanlah merupakan kegiatan yang gampang. Orang tua perlu memberikan support dan dorongan agar anak bisa tetap pada interest dan kesenangan dalam belajar. Anak akan sering menghadapi kesulitan dalam satu mata pelajaran tertentu atau lebih. Kesulitan-kesulitan akan menyebabkan anak patah semangat untuk belajar dan tidak jarang menyebabkan anak mempunyai "*self concept*" yang jelek. Usaha-usaha membesarkan hati manakala anak menghadapi kesulitan dan memberikan pujian manakala anak mendapatkan prestasi yang baik sangat diperlukan bagi anak-anak sekolah dasar.

Kegiatan belajar anak pada hakekatnya tidak hanya berlangsung di sekolah atau di

ruang-ruang kelas. Di luar sekolah pun proses ini berlangsung. Orang tua bisa menggunakan kesempatan kumpul sebagai media bagi anak untuk belajar. Anak-anak yang datang dari keluarga di mana sering melakukan diskusi antara anggota keluarga menunjukkan prestasi yang lebih baik daripada anak yang di rumah tidak pernah berbincang-bincang dengan orang tua atau saudaranya.

Prestasi anak yang datang dari keluarga dimana komunikasi sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia (bahasa yang digunakan di sekolah) lebih tinggi daripada prestasi anak yang di rumah tidak menggunakan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia di rumah akan memperkaya kemampuan bahasa anak. Secara langsung anak mengembangkan kemampuan bahasa Indonesia di rumah.

Keluarga merupakan tempat di mana anak bisa mendapatkan motivasi untuk belajar dan mengembangkan harapan-harapan pendidikan dan gaya hidup di masa depan. Orang tua mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengembangkan motivasi dan aspirasi pendidikan anak. Orang tua seyogyanya mempunyai informasi yang jelas tentang aktifitas anak di sekolah, mata pelajaran apa yang membuat anak senang dan tidak senang, di mana kelebihan dan kekurangan anak dalam belajar. Orang tua di samping memberikan support seyogyanya juga memberikan standar yang

harus dicapai oleh anak. Anak-anak yang datang dari keluarga di mana orang tua mengembangkan motivasi dan aspirasi belajar anak, memiliki prestasi yang lebih tinggi daripada anak yang datang dari keluarga di mana orang tua tidak pernah mengembangkan motivasi dan aspirasi pendidikan anaknya.

Melihat hasil-hasil penelitian di atas, maka usaha peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar, khususnya, bisa dipisahkan dan lingkungan keluarga. Orang tua tidak bisa menyerahkan secara 100% agar anaknya dididik di sekolah. Perlu ada kerjasama antara sekolah dan orang tua dalam usaha meningkatkan kualitas sekolah. Orang tua perlu mendapatkan informasi apa yang harus dilakukan di rumah untuk menunjang keberhasilan anak di sekolah. Hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan di Indonesia bisa dijadikan bahan untuk diinformasikan kepada orang tua. Problemanya, siapa yang harus melakukan?

Sekolah-sekolah mempunyai lembaga Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3). Sampai saat ini lembaga tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal, baru terbatas untuk menghubungkan dana pembangunan gedung. Sesungguhnya BP3 ini bisa ditingkatkan perannya, dari pengumpul uang pembangunan gedung menjadi pemegang peran mempertemukan apa yang terjadi di sekolah dan apa yang seyogyanya

dilakukan oleh orang tua kepada anaknya di rumah, dalam kaitannya dengan proses belajar anak di sekolah.

Dengan kata lain untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dasar perlu ada kerjasama yang erat antara orang tua dan guru, antara sekolah dan rumah. Orang tua tahu apa yang terjadi di sekolah, sebaliknya guru bisa memberikan pengarahan apa yang seyogyanya dilakukan oleh orang tua terhadap anak dalam rangka menunjang keberhasilan anak di sekolah.

2. Permasalahan Sekolah Dasar

a. Permasalahan Guru

Permasalahan pendidikan dapat didekati dengan pendekatan *macrocosmics* dan *microcosmics*. Pendekatan *macrocosmics* berarti permasalahan guru dikaji dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain di luar guru. Hasil pendekatan ini adalah bahwa rendahnya kualitas guru dewasa ini di samping muncul dari keadaan guru sendiri juga sangat terkait dengan faktor-faktor luar guru. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas guru, antara lain: a) penguasaan guru atas bidang studi, b) penguasaan guru atas metode pengajaran, c) kualitas pendidikan guru, d) rekrutmen guru, e) kompensasi guru, f) status guru di masyarakat, g) manajemen sekolah, h) dukungan masyarakat, dan, i) dukungan pemerintah.

Penguasaan guru atas bidang studi yang akan diajarkan kepada para siswa

merupakan sesuatu yang mutlak sifatnya. Sebab, dengan materi bidang studi tidak saja guru akan mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada siswa, tetapi lebih daripada itu, dengan materi bidang studi itu guru akan menanamkan disiplin, mengembangkan *critical thinking*, mendorong kemampuan untuk belajar lebih lanjut, dan yang tidak kalah pentingnya adalah menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam ilmu pengetahuan itu sendiri pada diri siswa. Penguasaan kemampuan guru di bidang metodologi pengajaran juga penting. Tetapi perlu dicatat bahwa, kemampuan metode dalam pengajaran kalau diwujudkan dalam simbol bagaikan angka "0". Artinya, betatapun banyak dan tingginya kemampuan metodologi pengajaran tidak memiliki nilai apa-apa, apabila tidak digabungkan dengan angka lain 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9 yang merupakan wujud dari kemampuan penguasaan bidang studi. Dalam masalah penguasaan materi bidang studi inilah kelemahan guru sangat menonjol. Suatu studi menunjukkan bahwa penguasaan bidang studi para guru kalau diwujudkan dalam skor yang terentang antara 0 - 10, terletak pada titik sekitar 7, dan untuk mata pelajaran matematika dan IPA lebih rendah lagi.

Rendahnya penguasaan guru pada bidang studi menurut Zamroni (2012) tidak lepas dari kualitas pendidikan guru dan

rekrutmen calon guru. Dapat dicatat bahwa selama ini terdapat tiga bentuk kurikulum yang mencerminkan fase pemikiran di lingkungan lembaga pendidikan guru. Fase pertama ditunjukkan dengan kurikulum pendidikan guru (IKIP, FKIP, dan STKIP) sebelum kurikulum IKIP 1984. Pada kurun waktu tersebut kurikulum pendidikan guru tidak jauh berbeda dengan kurikulum jurusan yang sama di universitas. Perbedaannya adalah pada mahasiswa pendidikan guru di samping memiliki bekal bidang studi yang memadai, juga ditambah dengan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan didaktik khusus. Pada waktu diberlakukannya kurikulum pendidikan guru 1984, terjadi perubahan yang mendasar. Mahasiswa pendidikan guru harus lebih menekankan pada metode mengajar dibandingkan dengan penguasaan materi bidang studi. Oleh karena itu tidak mengherankan, kalau beban SKS di lingkungan pendidikan guru didominasi oleh mata kuliah pendidikan. Sebaliknya, mata kuliah bidang studi jauh berkurang. Ibaratnya, pada kurikulum 1984 ini cara memegang kapurpun diajarkan di IKIP/FKIP/STKIP. Hasilnya, lulusan pendidikan guru dengan kurikulum 1984 tidak mampu mengajar sebagaimana seharusnya. Pada akhir tahun 1980-an kembali terdapat perubahan kurikulum di lingkungan pendidikan guru. Namun, kurikulum baru juga menunjukkan

ambivalensi antara penekanan pada bidang studi dan pada metode mengajar. Oleh karena itu hasil pendidikan guru masih juga diragukan, khususnya di bidang penguasaan bidang studi.

Sesungguhnya perubahan kurikulum pendidikan guru yang terjadi tidak bisa dilepaskan begitu saja pada pemahaman akan hakekat profesi guru. Apakah guru dikategorikan sebagai *hard profession* atau *soft profession*. Sebab, masing-masing kategori memiliki implikasi yang berbeda terhadap lembaga dan program pendidikan guru. Suatu pekerjaan dapat dikategorikan sebagai *hard profession* apabila pekerjaan tersebut dapat didetailkan dalam perilaku dan langkah-langkah yang jelas dan relatif pasti. Pendidikan yang diperlukan bagi profesi ini adalah menghasilkan output pendidikan yang dapat distandarisasikan. Artinya, kualifikasi lulusan jelas dan seragam di manapun pendidikan itu berlangsung. Dengan kualifikasi ini seseorang sudah mampu dan akan terus mampu melaksanakan tugas profesinya secara mandiri meskipun tanpa pendidikan lagi. Pekerjaan dokter merupakan contoh yang tepat untuk mewakili kategori *hard profession*. Sebaliknya, kategori *soft profession* adalah diperlukannya kadar seni dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Ciri pekerjaan tersebut tidak dapat dijabarkan secara detail dan pasti. Sebab, langkah-langkah dan tindakan yang harus diambil,

sangat ditentukan oleh kondisi dan situasi tertentu. Implikasi kategori *soft profession* tidak menuntut pendidikan dapat menghasilkan lulusan dengan standar tertentu melainkan menuntut lulusan dibekali dengan kemampuan minimal. Kemampuan ini dari waktu ke waktu harus ditingkatkan agar dapat melaksanakan tugas pekerjaannya sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga *inservice training* bagi *soft profession* amat penting. Barangkali, wartawan, advokat, dan guru merupakan contoh dari kategori profesi ini.

Berdasarkan pemahaman bahwa tugas guru merupakan *soft profession*, maka diperlukan perubahan yang mendasar pada proses pendidikan guru kita. Kualitas guru tidak bisa dilepaskan dari kompensasi yang mereka terima dan status guru di masyarakat. Namun, kompensasi atau gaji guru tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi suatu negara. Artinya, perbandingan gaji guru antar negara akan tidak pas kalau tidak ditimbang dengan kemakmuran bangsa tersebut. Gaji guru di Malaysia lebih besar dibandingkan dengan gaji guru di Indonesia, secara absolut. Namun, perbandingan akan berbeda manakala kedua gaji tersebut diperbandingkan dengan pendapatan perkapita negara masing-masing. Oleh karena itu, bukan hanya gaji yang penting melainkan bagaimana dukungan masyarakat

dan pemerintah bagi kesejahteraan dan status guru. Lagu Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa sangat mulia dan terhormat. Dalam setiap kesempatan wisuda sering lagu tersebut diperdengarkan, dan hadirin terbuai dengan kesyahduan. Namun, barangkali bagi guru sendiri akan lebih senang kalau lagu diubah menjadi “Guru Pahlawan Penuh Tanda Jasa. Dengan demikian, kelak tidak hanya muballigh yang ber-BMW atau Mercy, tetapi juga para guru. Namun, barangkali merupakan suatu kemustahilan, paling tidak untuk jangka pendek, untuk merealisasikan kompensasi guru yang memadai kalau hanya bersandarkan kepada anggaran pemerintah. Barangkali, sudah masanya untuk dipikirkan mobilisasi dana pendidikan atau dana kesejahteraan guru yang berasal dari masyarakat. Kalau untuk keperluan lain dana mudah diperoleh misalnya untuk prestasi olah raga, mengapa tidak bagi prestasi guru? Di sinilah letaknya, partisipasi orang tua dan dukungan masyarakat mutlak diperlukan untuk meningkatkan kualitas guru.

Kualitas guru yang ditunjukkan oleh kualitas kerja tidak dapat dilepaskan dari manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistik, dengan menempatkan pengambilan keputusan di tangan-tangan yang jauh dari guru tidak menguntungkan bagi usaha meningkatkan kualitas kerja guru. Sebab, pelaksanaan proses belajar mengajar di kelas sangat

tergantung pada kondisi dan situasi yang dipengaruhi oleh berbagai variabel. Oleh karena itu keputusan tentang bagaimana proses belajar mengajar harus dilaksanakan yang ditentukan dari atas sulit untuk dapat diterima akal sehat. Sebab, justru guru yang paling tahu apa yang harus dilakukan. Di pihak lain, dengan adanya ketentuan dari pusat beban guru lebih ringan. Karena kegagalan dalam mengajar bukan hanya dikarenakan olehnya tetapi juga oleh instruksi dari atas yang tidak jalan karena tidak cocok dengan keadaan di lapangan. Oleh karena itu, pemberian otonomi yang lebih besar kepada guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar akan memberikan rasa tanggung jawab lebih besar kepada guru. Rasa tanggung jawab ini mutlak diperlukan dalam meningkatkan kualitas guru.

Dengan pendekatan *microcosmics* dapat dideskripsikan bahwa keberhasilan guru sangat tergantung pada kemampuan dan dedikasi guru di satu pihak dan motivasi dan usaha keras dari siswa di pihak lain. Oleh karena itu, guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar juga harus mampu membangkitkan semangat untuk berprestasi di kalangan siswa. Tugas tersebut tidak ringan mengingat karakteristik yang melekat pada pekerjaan guru. Karakteristik pertama adalah pekerjaan guru bersifat individual dan cenderung *noncollaborative*. Kedua, pekerjaan guru dilakukan di ruang-ruang

kelas yang terisolir dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, ini merupakan akibat pertama dan kedua, waktu guru untuk berdialog akademik dengan sesama guru sangat terbatas. Karakteristik kerja guru ini menyebabkan guru merupakan pekerjaan yang tidak pernah mendapatkan umpan balik. Tanpa adanya umpan balik sulit bagi guru untuk dapat meningkatkan kualitas profesinya. Umpan balik merupakan sesuatu yang diperlukan oleh guru. Untuk itu, guru perlu dilengkapi dengan kemampuan untuk melakukan *self reflection*, untuk mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan dan bagaimana hasilnya.

Analisis dengan gabungan pendekatan *macrocosmics* dan *microcosmics*, menunjukkan bahwa persoalan guru dapat dikategorikan ke dalam berbagai kelompok. Mengikuti model analisis yang dikembangkan Boediono mengelompokkan sasaran wajib belajar menjadi 8 kelompok berdasarkan kemampuan ekonomi dan aspirasi pendidikan orang tua, persoalan guru dapat dikategorikan berdasarkan tiga variabel: ekonomi dengan predikat cukup dan kurang, kemampuan dengan predikat mampu dan tidak mampu, dan variabel dedikasi dengan predikat penuh dedikasi dan kurang dedikasi. Dengan demikian terdapat delapan kelompok guru: 1) ekonomi cukup, mampu dan dedikasi tinggi, 2) ekonomi cukup, mampu, tetapi tidak memiliki dedikasi, 3) ekonomi cukup, kurang mampu,

tetapi memiliki dedikasi tinggi, 4) ekonomi cukup, tidak mampu dan tidak memiliki dedikasi, 5) ekonomi kurang, tetapi mampu dan penuh dedikasi, 6) ekonomi tidak mampu, tidak memiliki dedikasi tetapi mampu, 7) ekonomi kurang, tidak mampu tetapi memiliki dedikasi tinggi, dan, 8) ekonomi kurang, tidak mampu dan tidak memiliki dedikasi.

Sudah barang tentu, kebijakan dan program peningkatan kualitas guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar tidak mungkin secara spesifik mendasarkan pada kategorisasi tersebut. Betapapun juga, gambaran kategori tersebut perlu untuk direnungkan dalam membenahi dan menata guru dewasa ini. Paling tidak, upaya peningkatan kualitas guru dengan penataran untuk meningkatkan kemampuan tidak cukup. Sebab, masih ada faktor lain yang perlu sentuhan, yakni semangat dedikasi guru dan kesejahteraannya.

a. Permasalahan Kebijakan

Kebijakan dan program peningkatan kualitas guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus menyentuh tiga aspek sebagaimana dikemukakan di atas: aspek kemampuan, aspek semangat dan dedikasi, dan aspek kesejahteraan. Kebijakan yang tidak lengkap, yang tidak mencakup ketiga aspek tersebut cenderung akan mengalami kegagalan.

Kebijakan untuk meningkatkan kualitas guru harus banyak bertumpu pada

inisiatif dan kemauan yang datang dari pihak guru sendiri. Dengan kata lain guru sebagai subjek bukannya objek. Untuk pengembangan kemampuan guru untuk belajar (bukan mengajar) sangat penting. Kemampuan belajar mencakup kemampuan untuk membaca dan mengkaji fenomena masyarakat secara efisien, kemampuan untuk menentukan bahan yang relevan dan perlu untuk dikaji, dan, kemampuan untuk mencari sumber pengetahuan. Dalam kaitan ini suatu mekanisme atau prosedur untuk munculnya umpan balik bagi guru sangat penting artinya. Salah satu yang mungkin dilaksanakan adalah membekali guru dengan kemampuan untuk melakukan *self reflection*, lewat *action research*.

Kemampuan untuk belajar ini akan dapat terus hidup dan tumbuh subur manakala guru memiliki cukup ruang untuk berinisiatif dan berimprovisasi. Untuk itu instruksi, juklak dan juknis yang berkaitan dengan pengajaran harus diminimalkan, kalau tidak dapat dihilangkan sama sekali. Perluasan otoritas guru ini harus pula diiringi dengan kebijakan untuk mengembangkan sistem akuntabilitas sekolah yang jelas dan transparan. Sekolah, termasuk guru harus menyusun program dan target kegiatan yang jelas dan dikomunikasikan kepada orang tua siswa dan masyarakat. Hasil kerja sekolah atas pencapaian target harus dapat dievaluasi dengan jelas oleh orang tua dan masyarakat.

Sekolah harus meletakkan orang tua dan masyarakat sebagai konsumen. Kepuasan konsumen harus ditempatkan pada prioritas paling tinggi. Untuk itu, sekolah di bawah pimpinan kepala sekolah harus dapat bekerja secara mandiri. Sekolah harus dijiwai watak ekonomi, kerja efektif dan efisien. Dalam kaitan inilah, *school site based management* merupakan suatu tuntutan dasar dalam upaya peningkatan kualitas sekolah. Dengan sistem manajemen ini otoritas sekolah semakin besar, termasuk tanggung jawab memajukan sekolah. Semakin besar otoritas dan tanggung jawab ini pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran pada diri guru untuk memberikan yang terbaik bagi siswanya.

Upaya peningkatan kualitas guru untuk meningkatkan kualitas lulusan harus disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru. Prinsip *school site based management* menuntut partisipasi dari pihak orang tua siswa dan masyarakat lebih besar. Partisipasi yang pertama berkaitan dengan upaya mobilisasi dana pendidikan, dan partisipasi kedua adalah aktivitas mereka dalam ikut memikirkan kemajuan sekolah. Oleh karena itu, sistem kerjasama orang tua dan sekolah perlu dikembangkan.

Dalam mobilisasi dana pendidikan akan terjadi ketimpangan antara satu sekolah dengan sekolah lain, sebagai akibat adanya perbedaan kualitas sekolah. Terdapat kecenderungan bahwa semakin berkualitas

suatu sekolah maka akan semakin besar kemampuan sekolah untuk memobilisasi dana pendidikan dari kalangan orang tua siswa dan masyarakat. Sudah barang tentu hal ini tidak perlu untuk dicegah. Yang penting adalah alokasi anggaran pendidikan pemerintah perlu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Anggaran pemerintah seyogyanya diarahkan ke sekolah-sekolah yang tidak mampu memobilisasi dana disebabkan kemampuan orang tua siswa yang rendah.

Usaha yang tiada pernah mengenal akhir bagi suatu negara adalah usaha untuk meningkatkan kemakmuran bangsanya. Hal itu dikarenakan pada hakekatnya apa yang dinamakan kemakmuran tidak ada batasnya. Negara yang sudah sedemikian maju pun, seperti Jepang, Jerman dan Amerika Serikat, misalnya, masih juga berjuang keras untuk mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Khususnya negara-negara sedang berkembang, nampaknya harus berusaha lebih keras dalam upaya meningkatkan kemakmuran masrarakatnya. Suatu keuntungan bagi negara negara sedang berkembang termasuk Indonesia, adalah bisa mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh negara negara yang sudah terdahulu mengalami kemajuan.

b. Permasalahan Tuntutan Perubahan

Proses pendidikan tidak berlangsung dalam suasana yang steril dan vakum,

melainkan proses pendidikan akan senantiasa berinteraksi dengan lingkungan, baik sosial, poli tik, budaya, ekonomi, dan agama. Oleh karenanya, dalam usaha meningkatkan kuaiitas pendidikan dan kualitas guru para pemegang kebijakan di bidang pendidikan harus senantiasa mengkaji dan memahami perkembangan masyarakat. mengkaji dan memahami masyarakat lingkungan di mana pendidikan senantiasa bereaksi merupakan sesuatu yang tidak ringan, untuk tidak mengatakan hal itu sebagai sesuatu yang berat. Tetapi persoalannya akan semakin pelik, karena apa yang dinamakan dengan lingkungan masyarakat senantiasa berubah dengan cepat. Sir Charles P Snow, Filosof dan sastrawan berkebangsaan Inggris, dalam suatu karya klasiknya *The Two Cultures* memberikan gambaran kecepatan perubahan yang terjadi di masa depan dengan menyatakan "bahwa selama sejarah umat manusia sampai abad ini tingkat perubahan sosial sangat lambat sehingga perubahan dapat berlangsung tanpa kita ketahui. Tetapi lambatnya perubahan sosial tidak akan terjadi lagi. Perubahan sosial dimasa datang / depan akan berlangsung sangat cepat. Begitu cepatnya perubahan sehingga imajinasi kita sekalipun tidak kuasa mengikutinya (Zamroni, 2012)".

Setiap perubahan sosial yang terjadi membawa problema baru di masyarakat. Untuk menghadapi problema-problema baru

tersebut masyarakat menuntut pembaharuan pendidikan dan kualifikasi baru untuk guru. Dengan demikian, pembaharuan harus pula dilaksanakan pada lembaga pendidikan guru.

PENDIDIKAN DASAR DAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

ASEAN merupakan gabungan bangsa-bangsa Asia Tenggara yang beranggotakan 10 negara (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja dan Timor Leste) memiliki pandangan terbuka, hidup dalam perdamaian, stabilitas dan kemakmuran, serta terikat bersama dalam kemitraan dalam pembangunan yang dinamis. Untuk itu, pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk membangun suatu “masyarakat ASEAN” pada tahun 2020. Dalam perkembangannya para pemimpin Negara anggota mempertegas komitmennya dan memutuskan untuk mempercepat pembentukan masyarakat ASEAN pada tahun 2015.

Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berlandaskan pada 3 pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community). Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN

Economic Community/AEC) 2015, akan diarahkan kepada pembentukan sebuah integrasi ekonomi kawasan dengan mengurangi biaya transaksi perdagangan, memperbaiki fasilitas perdagangan dan bisnis, serta meningkatkan daya saing sektor UMKM (Kemenkop UKM, 2015).

Pemberlakuan AEC 2015 bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dan secara ekonomi terintegrasi dengan regulasi efektif untuk perdagangan dan investasi, yang di dalamnya terdapat arus bebas lalu lintas barang, jasa, investasi, dan modal serta difasilitasinya kebebasan pergerakan pelaku usaha dan tenaga kerja.

Implementasi AEC 2015 akan berfokus pada sektor prioritas, yang terdiri atas 7 (tujuh) sektor barang (industri pertanian, peralatan elektronik, otomotif, perikanan, industri berbasis karet, industri berbasis kayu, dan tekstil) dan 5 (lima) sektor jasa (transportasi udara, pelayanan kesehatan, pariwisata, logistik, dan industri teknologi informasi atau e-ASEAN).

Selanjutnya menurut Gayatri (2014), keduabelas sektor prioritas dalam perdagangan barang dan jasa ini dapat diunggulkan dalam pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 2015. Ke-12 sektor tersebut terdiri atas delapan sektor perdagangan barang dan empat sektor dalam bidang jasa. Sektor perdagangan barang mencakupi bidang

pertanian, perikanan, industri karet, industri kayu, industri tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta teknologi informasi dan komunikasi. Sementara itu, empat sektor perdagangan jasa mencakup bidang kesehatan, pariwisata, perhubungan udara, dan logistik. Untuk bidang kesehatan, ada tiga subsektor yang diklasifikasikan, yakni kedokteran umum, kedokteran gigi, dan keperawatan.

Adapun sektor tenaga kerja yang akan bersaing di dalam MEA adalah (1) *medical* (dokter dan obat); (2) perawat (*nurses*); (3) *architecture, engenering* (tenaga ahli); (4) *dental* (dokter gigi); (5) *accounting* (akuntan); (6) *surveyor* (tenaga survei); dan (7) *tourisme* (pariwisata). Dalam konteks tenaga terampil sebagai tenaga kerja dalam bursa tenaga kerja MEA, posisi Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Sebagai bahan kajian mendalam dapat disajikan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tahun 2013 jumlah tenaga kerja pendidikan dasar dan tanpa pendidikan mencapai 35, 88 juta orang. Indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI) Indonesia juga masih rendah. Dari 182 negara di dunia, Indonesia berada di urutan 111. Sementara di kawasan ASEAN, HDI Indonesia berada di urutan enam dari sepuluh negara ASEAN. Posisi HDI Indonesia masih dibawah Filipina, Thailand, Malaysia, Brunei dan Singapura (Kahfi, 2015). Data ini

memberikan peringatan kepada kita, bahwa Indonesia masih perlu mempersiapkan diri secara lebih serius menghadapi MEA. Posisi kita akan aman jika berada pada posisi ketiga setelah Singapura, Malaysia atau paling tidak ke empat dibawah Thailand.

Dunia pendidikan Indonesia perlu menyiapkan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam upaya menghadapi tantangan ini ke depan. Berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2014 tentang peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, negara menegaskan bahwa pengembangan tenaga kerja Indonesia difokuskan pada peningkatan daya saing tenaga kerja dan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja (Kementerian Sesneg, 2015). Dalam upaya daya saing dan kompetensi inilah, maka peran pendidikan dasar menjadi sangat penting.

KESIMPULAN

Kemajuan ekonomi ini tidak seiring dengan kemajuan pendidikan meskipun ada hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia berada pada posisi yang perlu mempersiapkan diri secara lebih serius untuk bersaing menghadapi berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN. Indonesia memerlukan sumberdaya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama pembangunan dibidang ekonomi.

Proses pendidikan di sekolah dasar menempati posisi yang sangat vital dan strategis. Kekeliruan dan ketidaktepatan dalam melaksanakan pendidikan di tingkat dasar ini akan berakibat fatal untuk pendidikan tingkat selanjutnya. Sebaliknya, keberhasilan pendidikan pada tingkat ini akan membuahkan keberhasilan pendidikan tingkat lanjutan.

Ada tiga hal mendesak yang perlu dilakukan dalam rangka menyiapkan pendidikan dasar yang baik, pertama : pentingnya peningkatan kualitas sekolah dasar, kedua: pentingnya mengatasi permasalahan sekolah dasar yang meliputi (1) permasalahan guru, (2) permasalahan kebijakan dan (3) permasalahan tuntutan perubahan.

Dunia pendidikan dasar perlu menyiapkan lulusan yang kokoh yang dibutuhkan dalam upaya menghadapi tantangan perubahan ke depan. Pengembangan tenaga kerja Indonesia difokuskan pada peningkatan daya saing tenaga kerja dan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang perlu disiapkan sejak di sekolah dasar. Dalam upaya daya saing dan kompetensi inilah, maka peran pendidikan dasar menjadi sangat penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Coughlan, Sean (2015): *Asia Peringkat Tertinggi Sekolah Global, Indonesia Nomor 69*. Diakses pada 29 Maret 2016 pada laman: <http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/05/150513>
- Gayatri, Mentari Dwi. (2014). *Indonesia Miliki 12 Sektor Prioritas Hadapi MEA*. Dapat diakses di laman <http://www.antaranews.com/berita/>
- Goleman, D. (1996). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*.
- Halstead, J. Mark dan Taylor, Monica J. (2000). "Learning and Teaching about Values: A Review of Recent Research." *Cambridge Journal of Education*. Vol. 30 No.2, pp. 169-202.
- Kahfi, Sahibul, (2015). *Indonesia Menyapa MEA*. Dapat diakses melalui laman: http://www.kompasiana.com/www.kompasiana.com/sahibulkahfi/indonesia-menyapa-mea_5535a27b6ea834b80fda430d.
- Pujiastuti, Lani (2015) *Ekonomi RI Peringkat Tiga Besar di G20*. Artikel: Majalah Finance.detik.com: Diakses 1 April 2015 di laman: <http://finance.detik.com/read/2015/08/27/113636/3002715/5>
- Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, (2010). *Bahan Pelatihan Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai-nilai Budaya untuk Membentuk Daya Saing dan Karakter Bangsa*. Dapat diakses di laman: <http://rumahinspirasi.com/18-nilai-dalam-pendidikan-karakter-bangsa/>
- Kelompok Kerja MEA, Kemenkop UKM. (2015). Diakses pada tanggal: 18 Nopember 2015 dari laman: <http://www.depkop.go.id/index.php?>
- Kementerian Sekretariat Negara, (2015). *Inpres Nomor 6 Tahun 2014 tentang peningkatan daya saing nasional dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN*.
- Supriyanto dan Noor, HM Tauchid, (2016) *Penguatan pendidikan karakter dalam rangka menghadapi pasar terbuka Masyarakat Ekonomi ASEAN*. Makalah Seminar Nasional :

Penguatan Pendidikan Karakter
Pancasila di Sekolah dan Perguruan
Tinggi, FIP Universitas Kanjuruhan
Malang, 16 Januari 2016.

*Undang-Undang Republik Indonesia No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional*

Zamroni. (2102). *Paradigma Pendidikan
Masa Depan*. Direktorat Pendidikan
Dasar dan Menengah. Jakarta:
Kementerian Pendidikan Nasional.

40. PENGUATAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR DALAM RANGKA MENGHADAPI PASAR TERBUKA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

ORIGINALITY REPORT

14%	11%	6%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

1%
★ Submitted to Defense University
Student Paper

Exclude quotes	On	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	On		